

**PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PERANGKAT
NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**BAIYULIS
TM/NIM: 2014/14042067**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar

Nama : Baiyulis
TM/NIM : 2014/14042067
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 1989031003

Pembimbing II



Dra. Jumiati, M.Si
NIP. 19621109 1986022001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam
Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Baiyulis
TM/NIM : 2014/14042067
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2018

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1.
Sekretaris	: Dra. Jumiati, M.Si	2.
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	3.
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	4.

Mengesahkan:
Dekan FIS/UNP



Prof. Dr. Sulfri Anwar, M.Pd

NIP. 19671001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baiyulis
TM/NIM : 2014/14042067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan



Baiyulis
2014/14042067

ABSTRAK

BAIYULIS :NIM 14042067/2014 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja perangkat nagari terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena masih kurangnya kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar yang disebabkan oleh rendahnya kepuasan kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah perangkat nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 525 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 228 orang perangkat nagari dengan tingkat kesalahan 5% dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Proporsional Random Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket yang disebarkan kepada responden dengan pengukuran skala likert. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda.

Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel gaji terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 20,6%, pengaruh variabel pekerjaan itu sendiri terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 1,9%, pengaruh rekan kerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 3,5%, pengaruh pengawasan terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 16,1%, pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 15,4%, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 16,7%, dan secara bersama-sama pengaruh gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, pengawasan, promosi jabatan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar sebesar 30,9%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja perangkat nagari berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Nagari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”**.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai pembimbing II..
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku pembimbing I
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Adil Mubarak S.IP, M.Si selaku dosen penguji dan Ibuk Nora Eka Putri S.IP, M.Si.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawanati keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Wali Nagari beserta perangkat yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.

8. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Mei 2018

Penulis

BAIYULIS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kinerja.....	12
1. Pengertian Kinerja.....	12
2. Indikator Kinerja	13
3. Karakteristik Kinerja	14
B. Kepuasan Kerja.....	15
1. Pengertian Kepuasan Kerja	15
2. Teori Kepuasan Kerja.....	17
3. Indikator Kepuasan Kerja.....	22
C. Pengelolaan Keuangan Nagari	25
1. Keuangan Nagari	25
2. Pengelolaan Keuangan Nagari	26
3. Asas Pengelolaan Keuangan Nagari.....	27
4. Perangkat Nagari	29
5. Indikator Kinerja Perangkat Nagari	36
D. Kerangka Konseptual.....	38
E. Penelitian yang Relevan.....	40
F. Hipotesis Penelitian	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	44
C. Definisi Operasional	44
D. Variabel Penelitian.....	47
E. Populasi Dan Sampel	48
F. Instrumen Penelitian	50
G. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	51
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	52
I. Teknik Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	64
B. Temuan Khusus	73
C. Pembahasan.....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi Penelitian.....	48
Tabel 2. Unit sampling penelitian.....	50
Tabel 3. Tabel Pengukuran Variabel.....	51
Tabel 4. Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja.....	53
Tabel 5. Uji validitas variabel kinerja dalam pengelolaan keuangan Nagari.....	54
Tabel 6. Uji reliabilitas Variabel Kepuasan Kerja	55
Tabel 7. Uji reabilitas variabel kepuasan kerja secara keseluruhan.....	56
Tabel 8. Uji reliabilitas variabel kinerja dalam pengelolaan keuangan Nagari	57
Tabel 9. Uji reliabel variabel kinerja dalam pengelolaan keuangan Nagari secara keseluruhan	58
Tabel 10. Karakteristik responden berdasarkan umur	68
Tabel 11. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	68
Tabel 12. Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan	69
Tabel 13. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	70
Tabel 14. Karakteristik responden berdasarkan jabatan	71
Tabel 15. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan bersih.....	72
Tabel 16. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	73
Tabel 17. Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja.....	74
Tabel 18. Deskripsi variabel kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari	76
Tabel 19. Hasil Uji Multikolinieritas Kepuasan Kerja secara Simultan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	80
Tabel 20. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja secara Simultan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	82
Tabel 21. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja(Gaji) terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	82

Tabel 22. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja(pekerjaan itu sendiri) terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	83
Tabel 23. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja(Rekan Kerja) terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	83
Tabel 24. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja(Pengawasan) terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	84
Tabel 25. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja(Promosi Jabatan) terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	84
Tabel 26. Hasil Uji Autokorelasi Kepuasan Kerja(Lingkungan Kerja) terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	85
Tabel 27. Variabel Penelitian.....	86
Tabel 28. Hasil Uji Kontribusi Kepuasan Kerja secara keseluruhan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	87
Tabel 29. Hasil uji T dan regresi linier berganda kepuasan kerja terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari.....	88
Tabel 30. Pengaruh Gaji terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	90
Tabel 31. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Gaji terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	91
Tabel 32. Pengaruh Pekerjaan yang dilakukan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	92
Tabel 33. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh pekerjaan yang dilakukan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	93
Tabel 34. Pengaruh Rekan Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	94
Tabel 35. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Rekan Kerja terhadap Kinerja	

Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	94
Tabel 36. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	95
Tabel 37. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	96
Tabel 38. Pengaruh Promosi Jabatan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	97
Tabel 39. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Promosi terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	98
Tabel 40. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	99
Tabel 41. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	100
Tabel 42. Hasil uji anova (F) Kepuasan kerja secara keseluruhan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	101
Tabel 43. Ringkasan Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Kantor Wali Nagari Situmbuak	5
Gambar 2. Kerangka Konseptual	39
Gambar 3. Peta Kabupaten Tanah Datar.....	65
Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar	67
Gambar 5. Hasil Uji Normalitas Kepuasan Kerja secara keseluruhan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	77
Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastitas Kepuasan Kerja secara Simultan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	78
Gambar 7. Hasil Uji Linieritas Kepuasan Kerja secara keseluruhan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi membawa perubahan terhadap regulasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Regulasi sistem pemerintahan daerah terbaru adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Salah satu urusan pemerintahan tersebut adalah pengelolaan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut juga disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam UU tersebut pasal 1 ayat 1 dijelaskan pengertian desa yaitu:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa desa merupakan desa adat atau disebut dengan nama lain, hal ini berarti setiap daerah di Indonesia memiliki sebutan untuk sistem pemerintahan terendah tersebut. Menurut Widjaja (2010:3) mengemukakan, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul dan berhak menjalankan pemerintahannya. Ada yang menyebutnya sebagai desa dan ada pula dengan nama lain. Di Provinsi Sumatera Barat, nama lain

dari “Desa” adalah “Nagari” Menurut Widjaja (2010:3) mengemukakan, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul dan berhak menjalankan pemerintahannya.

Berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, dijelaskan bahwa pengertian nagari adalah sebagai berikut:

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat. Pemerintah Nagari sebagai pemerintah terendah berlaku dan ditetapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Di Tanah Datar sendiri, ketentuan terkait nagari diatur melalui Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008.

Dengan demikian Nagari sebagai suatu daerah yang memiliki pemerintahan tersendiri memiliki keuangan tersendiri pula yang diatur dalam peraturan tertentu. Regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan nagari diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa keuangan desa/nagari merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan dilaksanakan

dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (*value for money*)(PP Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Dana desa dialokasikan oleh pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa (UU No. 23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 3). Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa keuangan nagari dikelola dengan sebaik-baiknya secara sistematis dengan memperhatikan efektifitas penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 juga disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan desa. Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan nagari, namun pada kenyataannya pengelolaan keuangan nagari masih memiliki permasalahan. Permasalahan yang ditemui pada beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar, yaitu terkendala pada lambannya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten terkait pengelolaan keuangan nagari.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa permasalahan yang banyak ditemukan di dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanah Datar yaitu adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana Nagari. Salah satu informasi tersebut penulis temukan melalui website www.sumbartoday.com, yang merupakan salah satu kasus yang terjadi akibat kesalahan dalam

pengelolaan keuangan nagari adalah penyimpangan dana proyek pada Jorong Ombilin Nagari Simawang yang terjadi karena banyak dari perangkat desa atau nagari ini tidak paham cara dan sistem pengerjaan suatu proyek yang berstandarisasi Dinas Pekerjaan Umum. Permasalahan serupa juga terjadi Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari tersebut adalah indikasi kinerja yang belum baik.

Kepuasan kerja merupakan hal yang penting dalam menentukan kinerja pegawai, karena seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Sehingga kepuasan kerja pegawai dapat dilihat dari sikapnya terhadap pekerjaannya (Wibowo, 2013:502). Kepuasan kerja menjadi faktor yang mendorong agar kinerja pegawai tersebut dapat baik. Idealnya kepuasan kerja seorang pegawai harus tinggi, agar kinerjanya juga tinggi. Namun pada kenyataannya, kepuasan kerja pegawai atau perangkat nagari di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar masih rendah. Informasi yang penulis dapatkan dari beberapa nagari bahwa perangkat nagari kurang puas terhadap pekerjaannya. Dalam beberapa wawancara yang penulis lakukan terhadap perangkat nagari menyatakan bahwa permasalahan yang ada memang benar salah satunya berkaitan dengan kepuasan kerja.

Wawancara penulis dengan Sekretaris nagari Situmbuak pada tanggal 7 September 2017, ia mengatakan bahwa pengelolaan keuangan nagari memang belum maksimal diantaranya disebabkan oleh kurangnya kepuasan pegawai terhadap lingkungan kerja terutama karena kantor wali

nagarinya tidak memadai karena kantor yang bagus dan nyaman berpengaruh terhadap kinerja pegawai nagari. Selain itu kinerja perangkat nagari kurang maksimal karena gaji yang diterima masih dibawah upah minimum regional. Berikut gambaran kantor wali nagari Situmbuak:

Gambar 1. Foto Kantor Wali Nagari Situmbuak



Yuliansyah dan Rusmianto (2017:47) pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian atau siklus dan asas tersebut harus dilaksanakan oleh setiap desa dengan sebaik baiknya, namun siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan nerjalan dengan baik apabila tidak adanya tata pemerintahan desa yang baik (Yuliansyah,2017:47). Jadi, anggaran atau dana yang ada harus dikelola dengan benar dan tentunya pengelolaan tersebut harus didukung sumber daya manusia (pengelola) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat melalui kinerja dari perangkat nagari.

Edison dkk (2016:190) menyatakan bahwa kinerja merupakan sebuah hasil yang dicapai dari suatu proses pada suatu periode tertentu dan dapat

diukur berdasarkan indikator-indikator yang ada, sehingga kinerja yang optimal bukan sebuah kebetulan. Kinerja merupakan kunci dari efektivitas sebuah organisasi. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan nagari salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepuasan kerja perangkat nagari yang berdampak kepada buruknya kinerja perangkat nagari. Sehingga dapat dikatakan bahwa karyawan (perangkat nagari) akan berkinerja baik apabila mereka memiliki kepuasan kerja. Dalam artian, peningkatan kepuasan kerja akan meningkatkan kinerja pegawai (Gibson dalam Wibowo, 2013:510).

Menurut Luthans, kepuasan kerja merupakan keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Indikator kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Luthans (2011:141) meliputi: gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, pengawasan, promosi jabatan, dan lingkungan kerja. Indikator digunakan untuk mengukur penyebab kepuasan kerja seorang perangkat nagari, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang menimbulkan kepuasan dan ketidakpuasan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan. Syamsir (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kapasitas atau kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, salah satunya adalah kepuasan kerja perangkat nagari. Model lainnya yang harus diperhatikan adalah motivasi kerja, kompetensi, kompensasi, dan lingkungan kerja.

Hasil wawancara penulis selanjutnya yaitu dengan Kaur Pembangunan Pasié Laweh. Ia menjelaskan bahwa kurangnya kepuasan kerja karena kondisi kantor wali nagari yang tidak bersih, sehingga mengganggu kenyamanan kerja. Hal ini senada dengan fakta yang penulis temukan di Nagari Minangkabau bahwa kantor wali nagarinya kurang bersih. Selain masalah tersebut juga terdapat kantor wali nagari yang memiliki ruang sempit sehingga pegawai kurang leluasa bekerja.

Informasi yang penulis dapatkan di beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa penempatan atau pembagian tugas terhadap perangkat nagari tidak sesuai dengan keterampilan atau latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Hal ini juga berdampak terhadap kepuasan kerjanya serta kinerjanya. Berdasarkan pendapat Luthans persoalan di atas termasuk ke dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerjaan itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang perangkat nagari di Nagari Tabek Patah pada tanggal 2 Oktober 2017, pengawasan atau supervisi memiliki peranan penting terhadap perangkat nagari dalam menjalankan tugasnya akan tetapi persoalannya adalah atasannya yang seharusnya melakukan pengawasan tersebut jarang berada ditempat, kadang bersikap tidak peduli terhadap bawahannya. Dari berbagai persoalan di atas dapat dipahami bahwa begitu permasalahan yang dihadapi oleh perangkat nagari terutama dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu berdasarkan pada permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan nagari terkendala pada lambannya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten
2. Pengelolaan keuangan nagari belum didukung oleh sumber daya manusia yang baik
3. Kinerja pengelolaan keuangan nagari yang belum baik.
4. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan nagari disebabkan oleh kurangnya kepuasan kerja
5. Tidak maksimalnya kinerja disebabkan karena kurangnya kepuasan terhadap lingkungan kerja, pekerjaan itu sendiri, supervisi dan gaji yang diterima perangkat nagari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dengan mengingat cukup luasnya identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, dan keterbatasan tenaga serta keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan di atas. Adapun batasan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah kepuasan kerja perangkat nagari dan pengaruhnya terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh gaji terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah terdapat pengaruh pekerjaan yang dilakukan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah terdapat pengaruh rekan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
4. Apakah terdapat pengaruh pengawasan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
5. Apakah terdapat pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
6. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar

2. Untuk menganalisis pengaruh pekerjaan yang dilakukan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk menganalisis pengaruh rekan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
4. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
5. Untuk menganalisis pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
6. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar
7. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan keilmuan Administrasi negara khususnya mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dan mata kuliah Pemerintahan Nagari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Bagi aparatur nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari
- b. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana administrasi publik pada Jurusan IAN FIS UNP dan secara akademis dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi, terutama yang terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Mata kuliah Pemerintahan Nagari.